



Community Empowerment Through Asset-Based Tourism Development: A Case Study Of Romokalisari Adventure Land, Surabaya

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Aset: Studi Kasus Romokalisari Adventure Land, Surabaya

Afifah Dina Fatin, M. Husni Tamrin*, Deasy Arieffiani, Agus Wahyudi

Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Asset-Based Community Development (ABCD) approach in managing Romokalisari Adventure Land, a natural tourist destination operated by low-income communities (MBR) in Surabaya City. A qualitative method was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that while the Asset-Based principle has been effectively applied through the empowerment of Paguyuban ALR in managing tickets and micro-business stalls, challenges such as workforce retention and income disparities between micro-business operators and attractions remain significant barriers. The application of the Internally Focused principle allows communities to manage their assets independently; however, economic inequalities and unresponsive ticket pricing policies negatively impact community welfare. Furthermore, the relationship between the Department of Food Security and Agriculture (DKPP) and Paguyuban ALR has not been optimal in strategic decision-making. The main findings suggest that the success of the ABCD approach heavily relies on enhanced communication, clear SOP formulation, and ongoing training support.

Keywords: Asset-Based Community Development, Romokalisari Adventure Land, government-community relations

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Noviyanti

Reviewed by:

SettingsTri Yuniningsih and Dhea Candra Dewi

*Correspondence:

M. Husni Tamrin

m.husnitamrin@hangtuah.ac.id

Published: 31 Oktober 2024

Citation:

Fatin, A. D., Tamrin, M. H., Arieffiani, D., & Wahyudi, A. (2024). *Community Empowerment Through Asset-Based Tourism Development: A Case Study Of Romokalisari Adventure Land, Surabaya.*

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 12:2.
doi: 10.21070/jkmp.v12i2.1788

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam pengelolaan Romokalisari Adventure Land, sebuah destinasi wisata alam yang dikelola oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Surabaya. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *Asset-Based* telah diterapkan dengan baik melalui pemberdayaan Paguyuban ALR dalam pengelolaan tiket dan lapak UMKM, tantangan seperti retensi tenaga kerja dan kesenjangan pendapatan antara pengelola UMKM dan wahana masih menjadi hambatan signifikan. Penerapan prinsip *Internally Focused* memungkinkan masyarakat untuk mengelola

aset secara mandiri, tetapi ketimpangan ekonomi dan kebijakan tarif tiket yang tidak responsif berdampak pada kesejahteraan. Selain itu, hubungan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Paguyuban ALR belum optimal dalam pengambilan keputusan strategis. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan ABCD sangat bergantung pada peningkatan komunikasi, penyusunan SOP yang jelas, dan dukungan pelatihan berkelanjutan

Kata Kunci: Asset-Based Community Development, Romokalisari Adventure Land, hubungan pemerintah-masyarakat

PENDAHULUAN

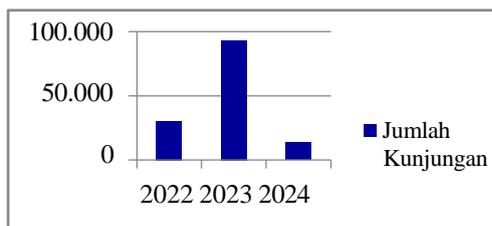
Pariwisata menjadikan industri utama yang dapat memajukan salah satu perkembangan ekonomi dengan cepat (Elgin & Elveren, 2024; Ndhlovu et al., 2024; Wani et al., 2024). Belakangan ini, pariwisata telah berubah menjadi kunci bagi penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan dan perkembangan di seluruh dunia (Haibo et al., 2020). Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) menjadikan pendorong pokok pada industri pariwisata, membutuhkan kolaborasi langsung dari perusahaan dan sektor swasta serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah (Budeanu et al., 2016; Fauzi, 2023). Salah satu pemerintah daerah yang memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Surabaya untuk mengembangkan potensi wisata di wilayahnya adalah Pemerintah Kota Surabaya. Dimana Pemerintah Kota Surabaya merupakan pihak yang mengelola Romokalisari Adventure Land Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pariwisata meliputi beragam aktivitas wisata dan diberikan beraneka macam sarana serta fasilitas yang disediakan untuk masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah (UU RI No. 10 Tahun 2009).

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 pada Bagian Kesebelas (UP XI Tambak Oso Wilangan) Paragraf 2 tentang Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang dalam pasal 252 menyebutkan bahwa menciptakan pembangunan wilayah yang memberikan manfaat bagi kota tepi air (*Waterfront City*), sentra penjualan jasa nasional dengan Pelabuhan Teluk Lamong seperti aktivitas pokok serta aktivitas pendukungnya meliputi perdagangan dan jasa, industri atau perdagangan, dan perumahan. Pada pasal 253 ayat 2 nomor 5 menyebutkan bahwa mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) publik dan privat di setiap wilayah perumahan dan zona industri (Pemerintah Kota Surabaya, 2018).

Hasil penelitian Ananda dan Koswara (2018) menunjukkan bahwa Surabaya meraih peringkat kedua dalam Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) 2016, menegaskan daya saingnya dalam industri pariwisata. Kota ini, dengan lokasi strategisnya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan wilayahnya ke depan, terutama di Kawasan Kota Tepi Pantai (*Waterfront City*) (Ananda & Koswara, 2018). Adityaji (2018) mencatat bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Adityaji, 2018). Peresmian Romokalisari Adventure Land sebagai objek wisata alam oleh Pemerintah Kota Surabaya pada September 2022 menambah pilihan wisata alam di kota ini, yang dikenal dengan keindahan alamiahnya (Pramesti et al., 2024).

Pada awal tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan retribusi tiket masuk untuk pengunjung Romokalisari Adventure Land dan Kebun Raya Mangrove (KRM) sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, menjelaskan bahwa implementasi retribusi ini bertujuan untuk mematuhi peraturan tersebut serta meningkatkan fasilitas dan wahana di dua tempat wisata tersebut. Biaya tiket masuk Romokalisari Adventure Land ditetapkan sebesar Rp 15.000,- pada awal implementasi, dengan penurunan menjadi Rp 10.000,- sejak tahun 2024.



Gambar 1. Jumlah Pengunjung Romokalisari Adventure Land Surabaya
Sumber: DKPP Kota Surabaya, 2024

Gambar 1 menjelaskan mengenai jumlah kunjungan Romokalisari Adventure Land Surabaya pada tahun 2022 hingga 2024 yang dapat diketahui jumlah total keseluruhan pengunjung tahun 2022 sebanyak 30.484. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah pengunjung yaitu sebanyak 93.141. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan pengunjung yang sangat drastis sekitar 13.332 karena selain telah diberlakukannya tiket masuk juga dalam masa perbaikan.

Menurut Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam Tamrin (2022), proses pembangunan yang dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat melibatkan inisiatif sosial yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperbaiki situasi mereka sendiri (Tamrin et al., 2022). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengambil inisiatif dalam mengelola inisiatif-inisiatif tersebut, di mana masyarakat atau kelompok terlibat berperan sebagai subjek atau agen pembangunan, bukan hanya sebagai objek penerima manfaat. Studi Mirza Maulana (2019) menunjukkan bahwa pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber kekuatan untuk kemajuan berkelanjutan (Maulana, 2019).

Romokalisari Adventure Land dikembangkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta masyarakat lokal sebagai pengelola wisata, menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang sinergis. Sebagai destinasi yang awalnya merupakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan, Romokalisari Adventure Land berhasil menjadi objek wisata alam yang menyajikan beragam wahana seperti wisata pancing, perahu, dan berbagai atraksi lainnya, serta menawarkan potensi penghasilan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diberdayakan. Pengelolaan Romokalisari Adventure Land menghadapi tantangan, termasuk penurunan kunjungan wisatawan setelah pemberlakuan retribusi tiket masuk, dan penurunan

Keterlibatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pengelolaan karena pendapatan dari wahana yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun demikian, pengembangan ini menjadi contoh penting bagi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), yang fokusnya pada pemanfaatan potensi lokal untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi pengembangan berkelanjutan Romokalisari Adventure Land serta kontribusi bagi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk mengembangkan Romokalisari Adventure Land sebagai destinasi wisata alam. Namun, keberhasilan pengembangan wisata ini tidak dapat dipisahkan dari peran serta dan pemberdayaan masyarakat lokal (Pramudyana & Prabowo, 2024)(Pramudyana & Prabowo, 2024). Pemberdayaan masyarakat, melibatkan pendekatan yang memungkinkan masyarakat memaksimalkan potensinya untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri, dan inisiatif ini berfokus pada peran masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar penerima manfaat (Ahmad & Islam, 2024). Dalam konteks ini, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat.

Pendekatan ABCD, seperti yang dijelaskan oleh Kretzmann dan McKnight (1993), menekankan pada pemanfaatan potensi lokal baik dari individu, asosiasi warga, maupun institusi lokal untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pengembangan ini menunjukkan

bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial yang signifikan jika dilakukan dengan memperkuat aset yang telah ada di masyarakat.

Keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam tantangan yang dihadapi oleh Romokalisari Adventure Land, terutama terkait penurunan jumlah pengunjung akibat pemberlakuan retribusi tiket masuk dan kurangnya keterlibatan MBR dalam pengelolaan wisata. Meskipun demikian, pendekatan ABCD yang menekankan pada hubungan antar-individu, asosiasi, dan institusi dapat menjadi solusi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan meningkatkan keberhasilan ekonomi mereka. Pengelolaan wisata yang berbasis pada aset lokal ini tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ABCD dapat memberikan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Romokalisari Adventure Land, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Dengan memperkuat aset-aset yang ada di masyarakat dan menjalin hubungan sinergis antara warga dan institusi, diharapkan pengembangan wisata alam seperti Romokalisari Adventure Land dapat menjadi contoh yang sukses dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun Romokalisari Adventure Land memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diidentifikasi dan ditangani. Salah satu gap utama adalah kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pengelolaan objek wisata ini, yang berdampak pada penurunan kunjungan setelah penerapan retribusi tiket masuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Romokalisari Adventure Land. Konsep penelitian ini berfokus pada analisis keterlibatan MBR dalam proses pengelolaan, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan potensi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Romokalisari Adventure Land.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) terbukti sebagai strategi efektif dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan sektor pariwisata dan kesehatan di Indonesia (Rahmawati et al., 2024). Harrison menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan kepercayaan dalam implementasi ABCD, yang berfokus pada pengembangan aset lokal sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Harrison et al., 2019). Maulana (2019) menyoroti bahwa kekuatan komunitas, termasuk sumber daya manusia dan alam, dapat dioptimalkan melalui pengembangan desa wisata, dengan ABCD memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara individu dan lembaga untuk mencapai tujuan bersama (Maulana, 2019).

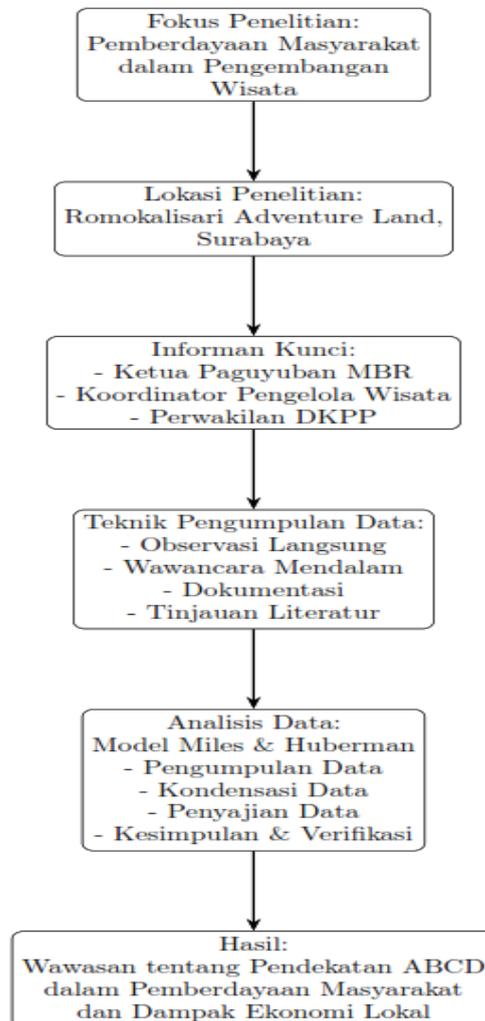
Selanjutnya, penelitian oleh Kristanto dan Putri (2021) menunjukkan bahwa pasca-pandemi COVID-19, pengembangan wisata kebugaran di Indonesia dapat diakselerasi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis aset, yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dan memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya pariwisata (Kristanto & Aishya Putri, 2021). Secara keseluruhan, ABCD diidentifikasi sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata Romokalisari Adventure Land Surabaya melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), yang berlandaskan pada prinsip-

prinsip Asset-Based, Internally Focused, dan Relationship Driven seperti yang dikemukakan oleh Kretzmann & McKnight (1993). Lokasi penelitian ini berada di Romokalisari Adventure Land, yang terletak berdekatan dengan Rusun Romokalisari, tepatnya di Jl. Romokalisari I, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat aktivitas pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pengelolaan wisata alam tersebut.

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Paguyuban MBR, yang merupakan tokoh utama dalam pengorganisasian masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan Romokalisari Adventure Land; Koordinator pengelola wisata, yang memimpin operasional harian dari berbagai wahana wisata di Romokalisari Adventure Land; dan perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, yang berperan sebagai lembaga pemerintah yang memberikan dukungan dan fasilitas untuk pengelolaan wisata ini. Selain itu, informan pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat pelaku UMKM yang terlibat dalam pengelolaan kios-kios usaha kecil di area wisata, yang memberikan perspektif mengenai dampak ekonomi lokal dari pengembangan wisata tersebut:



Gambar 2. Flowchart Metode Penelitian. Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung di lokasi wisata untuk memahami dinamika pemberdayaan masyarakat; wawancara mendalam dengan para informan kunci dan pendukung guna memperoleh pandangan dan

pengalaman mereka terkait pengelolaan Romokalisari Adventure Land; dokumentasi yang mencakup data tertulis atau visual mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata; serta tinjauan literatur yang digunakan untuk memperkuat analisis teori yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang melibatkan empat tahapan utama: pengumpulan data, di mana data lapangan dikumpulkan; kondensasi data, yang bertujuan mereduksi dan mengorganisasikan data untuk mempermudah analisis; penyajian data, yang dilakukan melalui penyusunan informasi secara sistematis; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana hasil analisis diperiksa kembali untuk memastikan validitas temuan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Romokalisari Adventure Land merupakan aset baru yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dan telah diresmikan sebagai destinasi wisata alam. Terletak di Jalan Romokalisari I, Kecamatan Benowo, dengan luas area mencapai 76.769 meter persegi, tempat ini tidak hanya menawarkan berbagai wahana bermain dan lapak-lapak UMKM, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan komunitas lokal. Keberadaan Romokalisari Adventure Land diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar, terutama bagi warga yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diberdayakan melalui program Padat Karya. Meskipun destinasi wisata ini sudah diresmikan dan dibuka untuk umum, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaannya, termasuk kebutuhan untuk peningkatan fasilitas yang lebih baik dan perbaikan akses transportasi guna mendukung kenyamanan pengunjung.

Pengelolaan Romokalisari Adventure Land melibatkan kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dengan masyarakat setempat, khususnya kelompok MBR yang tergabung dalam Paguyuban ALR. Kelompok ini memainkan peran kunci dalam manajemen dan operasional wisata, mulai dari pengelolaan tiket masuk, wahana permainan, hingga pengelolaan lahan parkir. Keberadaan Paguyuban ALR memungkinkan warga MBR untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata ini, sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan tambahan.

Prinsip *Asset-Based*

Prinsip *Asset-Based* merupakan inti dari pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang berfokus pada penggunaan potensi yang telah ada dalam komunitas. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada kekurangan atau masalah, tetapi pada aset yang dimiliki oleh komunitas tersebut, baik itu kapasitas individu, kemampuan sosial, maupun infrastruktur kelembagaan. Di Romokalisari Adventure Land, penerapan prinsip ini terlihat jelas melalui pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang tergabung dalam Paguyuban ALR. Paguyuban ini memainkan peran penting dalam pengelolaan harian destinasi wisata, termasuk dalam pengelolaan tiket masuk, tiket wahana, dan tiket parkir, yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat tanpa keterlibatan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban ALR, Mansyur, terungkap bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata tidak hanya memberi penghasilan tambahan tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemampuan manajerial masyarakat. Mansyur menjelaskan bahwa pengelolaan tiket dan wahana sepenuhnya diurus oleh anggota paguyuban. Menurut data primer yang didapat dari survei lapangan, pada tahun 2022, terdapat 89 orang pengelola yang terlibat aktif di Romokalisari Adventure Land. Namun, angka ini menurun menjadi 71 orang pada tahun 2023 dan lebih jauh lagi menjadi 40 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah pengelola ini diakibatkan oleh evaluasi yang dilakukan paguyuban untuk memastikan hanya individu yang aktif dan berkomitmen yang terus dilibatkan.

Tabel 1. Jumlah Pengelola Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Pengelola
2022	89
2023	71
2024	40

Sumber: Hasil Wawancara (2024)

Lebih lanjut, perolehan data melalui observasi langsung menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas seperti wahana perahu, sepeda air, dan lapak-lapak UMKM sepenuhnya dikelola oleh masyarakat MBR melalui Paguyuban ALR. Pemerintah Kota Surabaya hanya menyediakan infrastruktur dasar, sedangkan operasional harian dan perawatan fasilitas dilakukan oleh masyarakat setempat. Wawancara dengan beberapa pengelola UMKM menunjukkan bahwa pelatihan digital yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program e-Peken juga telah membantu mereka memperluas jangkauan pemasaran produk mereka, baik secara offline maupun online. Seorang pelaku UMKM, yang memiliki kios makanan di area wisata, menyatakan bahwa sejak pelatihan tersebut, omset bulannya meningkat sekitar 20-30% dibandingkan dengan sebelum adanya pelatihan.

Hasil penulisan data yang mendukung prinsip Asset-Based dalam konteks Romokalisari Adventure Land dapat dilihat dari laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (2022) yang mencatat bahwa Romokalisari Adventure Land diresmikan sebagai destinasi wisata alam dengan luas area 76.769 meter persegi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan destinasi ini melibatkan sekitar 50% warga MBR yang tinggal di sekitar Rusun Romokalisari, yang direkrut melalui sistem SIGAMIS—sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah kota untuk mengidentifikasi status sosial-ekonomi warga. Data dari Peraturan Daerah Surabaya No. 8 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa pengembangan kawasan wisata ini bertujuan untuk memajukan ekonomi lokal melalui program Padat Karya, yang berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan seperti nelayan, pengangguran, dan masyarakat terdampak relokasi.

Selain itu, studi oleh Mirza Maulana (2019) juga mendukung penerapan prinsip Asset-Based di Romokalisari. Dalam studinya tentang pengembangan pariwisata berbasis komunitas, Maulana menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal melalui program-program seperti pengelolaan wisata dan UMKM dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 40% dalam dua tahun pertama. Hal ini sejalan dengan temuan di Romokalisari, di mana partisipasi aktif warga MBR dalam pengelolaan tiket dan wahana telah memberikan peningkatan penghasilan yang signifikan. Studi tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dan penggunaan aset lokal sebagai dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan diatas, penerapan prinsip Asset-Based di Romokalisari Adventure Land menunjukkan hasil yang cukup baik dalam memberdayakan masyarakat lokal. Paguyuban ALR berfungsi sebagai lembaga yang memobilisasi aset komunitas, baik dalam bentuk tenaga kerja, keterampilan, maupun organisasi sosial. Warga MBR yang sebelumnya tergolong tidak sejahtera kini dapat terlibat dalam pengelolaan langsung wisata, yang mencerminkan bagaimana kapasitas individu dan kelompok telah dimaksimalkan untuk mendukung operasional destinasi wisata ini.

Namun, meskipun prinsip ini telah diterapkan dengan cukup baik, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah penurunan jumlah pengelola yang terlibat, yang menunjukkan adanya masalah dalam retensi tenaga kerja dan mungkin dalam manajemen organisasi. Penurunan jumlah ini juga dapat memengaruhi kelancaran operasional wisata, terutama pada masa-masa liburan ketika kunjungan wisatawan meningkat. Di sisi lain, perbedaan pandangan terkait kebijakan tarif tiket antara Paguyuban ALR dan pemerintah juga menjadi hambatan, karena tarif yang dinilai terlalu tinggi berdampak pada penurunan jumlah pengunjung, yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan masyarakat yang terlibat.

Dari segi keberlanjutan, laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya bertujuan untuk memberikan pekerjaan tambahan dan peningkatan keterampilan. Namun, keberhasilan jangka panjang model ini masih sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat serta pada penguatan kapasitas kelembagaan Paguyuban ALR untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terus mengelola wisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip *Asset-Based* di Romokalisari Adventure Land menunjukkan bahwa pengelolaan aset lokal oleh masyarakat dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan mandiri oleh Paguyuban ALR telah membuktikan bahwa masyarakat mampu memanfaatkan aset yang ada untuk meningkatkan pendapatan mereka, meskipun masih terdapat tantangan dalam retensi tenaga kerja dan harmonisasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Asset-Based* di Romokalisari Adventure Land berfokus pada pemanfaatan potensi lokal melalui Paguyuban ALR. Keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pengelolaan tiket dan wahana wisata mencerminkan pengembangan aset yang ada, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun organisasi sosial. Mansyur, Ketua Paguyuban ALR, menjelaskan bahwa pengelolaan tersebut memberikan penghasilan tambahan, meskipun pendapatan masih dianggap rendah. Data survei menunjukkan partisipasi aktif sebanyak 89 pengelola pada tahun 2022, tetapi jumlah ini menurun menjadi 40 pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh evaluasi untuk memastikan individu yang terlibat memiliki komitmen yang tinggi (Harrison et al., 2019; Maulana, 2019). Studi Maulana (2019) juga mengkonfirmasi bahwa pemberdayaan melalui pengelolaan wisata berbasis komunitas dapat meningkatkan pendapatan hingga 40persen, menunjukkan efektivitas prinsip ini dalam konteks lokal.

Prinsip *Internally Focused*

Prinsip *Internally Focused* dalam pengembangan berbasis aset menekankan pada pengembangan kapasitas internal komunitas, yang berarti strategi pengembangan harus dimulai dari penguatan kemampuan masyarakat lokal dalam menyusun agenda dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks Romokalisari Adventure Land, penerapan prinsip ini terlihat jelas melalui keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tergabung dalam Paguyuban ALR. Paguyuban ini memainkan peran sentral dalam pengelolaan harian destinasi wisata, termasuk dalam pengelolaan wahana wisata, tiket masuk, dan tiket parkir. Keterlibatan langsung ini memberikan masyarakat kemampuan untuk mengelola aset mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban ALR, Mansyur, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip *Internally Focused* ini berjalan. Mansyur menyatakan bahwa masyarakat yang tergabung dalam paguyuban awalnya terdiri dari warga yang masuk dalam kategori GAMIS (Golongan Miskin). Melalui program Padat Karya yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, mereka diberdayakan untuk mengelola berbagai aspek operasional Romokalisari Adventure Land. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mansur yang menjelaskan bahwa paguyuban ALR diberikan pelatihan dan diberi kesempatan untuk mengelola wahana secara langsung, termasuk tiket masuk dan parkir. Namun, pendapatan yang diperoleh masih belum cukup untuk keluar dari zona GAMIS.

Mansyur juga menyampaikan bahwa pendapatan dari pengelolaan tiket dan wahana hanya mencapai sekitar Rp 230.000,- per dua minggu, yang dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anggota Paguyuban ALR berharap ada peningkatan pendapatan karena saat ini masih jauh dari kata sejahtera, terutama untuk anggota paguyuban yang hanya mengandalkan pekerjaan ini. Pendapatan yang rendah ini menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan internal telah dilakukan, masih terdapat kendala ekonomi yang harus diatasi untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar dapat mencapai kesejahteraan yang diharapkan.

Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (2023)

mendukung temuan dari hasil wawancara. Laporan ini menyatakan bahwa program padat karya yang dijalankan di Romokalisari Adventure Land bertujuan untuk memberikan lapangan kerja tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di sekitar Rusun Romokalisari. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 40persen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata ini sebelumnya adalah nelayan dan masyarakat pengangguran yang terkena dampak relokasi.

Selain itu, laporan tersebut juga mencatat adanya penurunan pengunjung sejak diterapkannya tarif tiket masuk sebesar Rp 15.000,- yang kemudian diturunkan menjadi Rp 5.000,-. Namun, meskipun harga tiket diturunkan, penurunan jumlah pengunjung tetap terjadi karena kurangnya promosi terkait perubahan tarif ini. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *Internally Focused*, meskipun telah diterapkan dalam hal pengelolaan aset, masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani tantangan komunikasi dan pemasaran, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat yang terlibat.

Studi oleh Adityaji (2018) juga memberikan dukungan pada analisis ini. Dalam studinya mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan destinasi wisata, Adityaji menemukan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat hanya akan berdampak signifikan apabila disertai dengan manajemen yang efisien dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Ini berlaku dalam konteks Romokalisari Adventure Land, di mana masyarakat telah diberikan pelatihan dan kewenangan untuk mengelola aset mereka sendiri, namun tantangan ekonomi dan manajerial masih menjadi penghambat utama dalam mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Berdasarkan analisa data yang diperoleh, penerapan prinsip *Internally Focused* di Romokalisari Adventure Land tampak berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kewenangan untuk mengelola aset lokal, seperti wahana wisata dan lapak UMKM. Namun, keberhasilan pemberdayaan ini belum sepenuhnya tercapai karena masih ada ketimpangan pendapatan dan masalah dalam manajemen operasional yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan pendapatan antara pengelola UMKM dan pengelola wahana menjadi salah satu tantangan utama. Dalam wawancara, Mansyur menjelaskan bahwa pendapatan dari UMKM sangat bergantung pada volume penjualan produk, sementara pendapatan pengelola wahana berasal dari jumlah tiket yang terjual, yang dikurangi 20persen untuk dana operasional. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota paguyuban, terutama karena perbedaan hasil antara wahana yang dikelola oleh paguyuban dan yang dikelola oleh pihak non-paguyuban. Ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat diberdayakan untuk mengelola aset, pendistribusian hasil yang tidak merata masih menjadi masalah besar yang perlu diatasi.

Selain itu, tingginya tarif sewa bagi pedagang UMKM juga menambah beban ekonomi mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pedagang, dikenakan biaya sewa sebesar Rp 180.000,- per bulan untuk setiap stand UMKM, namun pendapatan mereka sering kali tidak mencukupi untuk membayar biaya sewa tersebut. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya sanksi bagi pedagang yang tidak aktif, yang mengakibatkan semakin banyak pedagang yang merasa tertekan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan kapasitas internal yang telah diterapkan masih perlu penyesuaian dalam aspek ekonomi, terutama dalam hal distribusi pendapatan dan kebijakan sewa.

Penerapan prinsip *Internally Focused* di Romokalisari Adventure Land menunjukkan upaya yang kuat untuk membangun kapasitas internal masyarakat, baik melalui pengelolaan aset lokal maupun peningkatan keterampilan individu. Masyarakat Romokalisari, melalui Paguyuban ALR, telah berhasil menjadi pengelola yang mandiri, namun tantangan dalam hal distribusi pendapatan, kesetaraan pengelolaan aset, dan pengelolaan kebijakan ekonomi masih menjadi hambatan utama. Data hasil wawancara dan data sekunder dari laporan resmi menunjukkan bahwa meskipun upaya pemberdayaan telah berjalan, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang lebih adil dan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang ada.

Prinsip *Internally Focused* menekankan pada pengembangan kapasitas internal masyarakat untuk menyusun agenda dan memecahkan masalah. Dalam konteks Romokalisari, meskipun masyarakat telah diberdayakan untuk mengelola aset mereka, pendapatan dari pengelolaan wahana dan tiket masih rendah, yaitu sekitar Rp 230.000 per dua

minggu. Mansyur menekankan bahwa pendapatan ini belum mencukupi kebutuhan hidup, yang menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang signifikan. Laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat bahwa 40 persen pengelola adalah nelayan dan masyarakat yang terdampak relokasi, tetapi meskipun ada penurunan tarif tiket, jumlah pengunjung tetap menurun karena kurangnya promosi (Maulana et al., 2019b). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas internal harus diimbangi dengan dukungan manajerial yang lebih baik dan strategi pemasaran yang efektif.

Prinsip *Relationship Driven*

Prinsip *Relationship Driven* dalam pengembangan masyarakat berbasis aset (ABCD) menekankan pentingnya hubungan yang kuat antar aktor, baik itu antara individu, kelompok, maupun institusi dalam komunitas. Menurut Kretzmann & McKnight (1993), keberhasilan pengembangan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aset internal yang dimiliki oleh komunitas, tetapi juga pada hubungan yang dibangun antara masyarakat lokal dengan lembaga-lembaga eksternal. Dalam konteks Romokalisari Adventure Land, penerapan prinsip ini terlihat dalam kolaborasi antara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang tergabung dalam Paguyuban ALR, dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (DKPP) sebagai perwakilan pemerintah. Hubungan ini berperan penting dalam memfasilitasi pelatihan, penyusunan kebijakan, hingga pengelolaan destinasi wisata.

Prinsip *Relationship Driven* dalam teori Asset-Based Community Development (ABCD) menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan masyarakat sangat bergantung pada kualitas hubungan yang terjalin antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut Kretzmann & McKnight (1993), hubungan ini mencakup aspek kepercayaan, komunikasi, dan kolaborasi yang memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk bersama-sama mencapai tujuan pengembangan yang berkelanjutan. Dalam teori ini, hubungan tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai modal sosial yang dapat memperkuat kemampuan komunitas untuk memobilisasi aset mereka secara lebih efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Paguyuban ALR, Mansyur, hubungan antara Paguyuban ALR dan DKPP masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis seperti penetapan tarif tiket masuk. Mansyur menyatakan bahwa meskipun ada pelatihan dan dukungan dari DKPP, kebijakan tarif tiket masuk yang tinggi (Rp 15.000,- sebelum diturunkan) telah menyebabkan penurunan jumlah pengunjung, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat. Mansyur juga menekankan bahwa rapat-rapat yang diadakan antara paguyuban dan DKPP sering kali hanya membahas isu-isu administratif, seperti penandatanganan anggota baru, tanpa menuntaskan masalah-masalah yang lebih strategis, seperti penurunan pengunjung dan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan formal, kualitas komunikasi dan kolaborasi belum sepenuhnya kuat, sejalan dengan teori yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah untuk mencapai tujuan bersama.

Hubungan antara pemerintah dan paguyuban juga diuji dalam hal pembagian pengelolaan aset wisata, terutama perahu wisata. Mansyur menyampaikan bahwa dari sepuluh perahu wisata, hanya tiga yang dikelola oleh paguyuban, sementara tujuh lainnya dikelola oleh pihak non-paguyuban, yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan anggota paguyuban, karena mereka merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dalam pengelolaan dan pendapatan aset wisata. Menurut teori modal sosial dari Putnam (1995), hubungan yang tidak seimbang antara kelompok lokal dan pihak luar dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya akan menghambat keberhasilan pengelolaan bersama.

Laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (2023) menekankan bahwa hubungan antara DKPP dan Paguyuban ALR dibangun melalui program pelatihan dan monitoring. Laporan ini mencatat bahwa DKPP mengadakan rapat evaluasi bulanan dengan Paguyuban ALR untuk membahas tantangan operasional yang dihadapi dalam pengelolaan Romokalisari Adventure Land. Dalam teori ABCD, rapat evaluasi ini merupakan salah satu mekanisme untuk membangun hubungan yang lebih kuat, karena memungkinkan adanya pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, seperti yang diungkapkan dalam wawancara, rapat ini sering kali tidak membahas masalah-masalah strategis yang lebih mendalam, yang dapat melemahkan efektivitas hubungan.

Studi oleh Sukmawati (2020) mendukung temuan ini dengan menekankan pentingnya hubungan yang transparan dan partisipatif dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Sukmawati menemukan bahwa hubungan yang tidak didukung oleh komunikasi terbuka dan partisipasi aktif dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan motivasi di kalangan masyarakat lokal. Ini terlihat dalam konteks Romokalisari, di mana kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis seperti penentuan harga tiket dan pengelolaan perahu wisata menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi merusak hubungan jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat.

Prinsip Relationship Driven di Romokalisari Adventure Land telah berhasil membangun hubungan formal antara masyarakat lokal, melalui Paguyuban ALR, dan DKPP. Hubungan ini tercermin dalam pelatihan yang diberikan, seperti pelatihan UMKM dan pemasaran digital, serta melalui platform e-Peken yang memungkinkan pelaku usaha kecil untuk memasarkan produk mereka secara daring. Inisiatif ini memperkuat modal sosial di antara masyarakat dan meningkatkan kapasitas mereka untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, yang merupakan salah satu tujuan utama dari teori ABCD.

Namun, meskipun aspek pelatihan dan pemberdayaan menunjukkan keberhasilan, hubungan antara Paguyuban ALR dan DKPP masih perlu diperkuat dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan strategis. Konflik terkait tarif tiket masuk, ketidakadilan dalam pengelolaan aset wisata, serta ketiadaan SOP yang jelas menunjukkan adanya kesenjangan struktural dalam hubungan ini. Menurut teori modal sosial dari Putnam, hubungan yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dapat menyebabkan penurunan partisipasi dan ketidakpuasan, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan program pemberdayaan.

Prinsip Relationship Driven di Romokalisari Adventure Land menunjukkan pentingnya hubungan yang kuat antara pemerintah (DKPP), Paguyuban ALR, dan masyarakat lokal. Meskipun ada aspek positif dalam hal pelatihan dan pemberdayaan, ketidakadilan dalam distribusi aset dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Teori ABCD menekankan bahwa hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah harus didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi yang terbuka, dan dalam kasus ini, aspek tersebut masih perlu diperkuat.

Prinsip Relationship Driven menggarisbawahi pentingnya hubungan antara aktor-aktor dalam pengembangan masyarakat. Di Romokalisari, hubungan antara Paguyuban ALR dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (DKPP) menghadapi tantangan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis, seperti penetapan tarif tiket masuk. Mansyur mencatat bahwa meskipun ada pelatihan, masalah terkait kebijakan tarif tiket yang tinggi menyebabkan penurunan jumlah pengunjung, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi dalam rapat-rapat yang sering kali hanya membahas isu administratif juga menjadi penghambat. Hasil studi menunjukkan bahwa hubungan yang transparan dan partisipatif sangat penting untuk pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, dan di Romokalisari, hal ini perlu diperkuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Maulana, 2019).

KESIMPULAN

Pengelolaan Romokalisari Adventure Land melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) telah menunjukkan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peran aktif Paguyuban ALR, yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dan berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Meskipun penerapan prinsip *Asset-Based*, *Internally Focused*, dan *Relationship Driven* mencerminkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk rendahnya pendapatan, penurunan jumlah pengelola, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara Paguyuban ALR dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (DKPP). Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan hubungan dan komunikasi antar pemangku kepentingan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta peningkatan dukungan pelatihan dalam aspek manajemen dan pemasaran. Selain itu, pengembangan model keberlanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ABCD menjadi krusial untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan mengatasi tantangan yang ada, Romokalisari Adventure Land berpotensi untuk mencapai keberhasilan yang lebih berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Adityaji, R. (2018). Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Dengan Menggunakan Metode Analisis SWOT: Studi Kasus Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(1). <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i1.2188>
- Ahmad, I., & Islam, M. R. (2024). Empowerment and Participation: Key Strategies for Inclusive Development. In *Building Strong Communities: Ethical Approaches to Inclusive Development* (pp. 47–68). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83549-174-420241003>
- Ananda, F. A., & Koswara, A. Y. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan Wisata Bulak Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), 95–99. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.34253>
- Budeanu, A., Miller, G., Moscardo, G., & Ooi, C.-S. (2016). Sustainable tourism, progress, challenges and opportunities: an introduction. *Journal of Cleaner Production*, 111, 285–294. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.027>
- Elgin, C., & Elveren, A. Y. (2024). Unpacking the economic impact of tourism: A multidimensional approach to sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 478, 143947. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143947>
- Fauzi, M. A. (2023). Sustainable tourism and sustainable development goals (SDGs): a state-of-the-art review of past, present, and future trends. In *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04077-0>
- Haibo, C., Ayamba, E. C., Udimal, T. B., Agyemang, A. O., & Ruth, A. (2020). Tourism and sustainable development in China: a review. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(31), 39077–39093. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10016-7>
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-Based Community Development: Narratives, Practice, and Conditions of Possibility—A Qualitative Study With Community Practitioners. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244018823081>
- Kristanto, T. B. A., & Aishya Putri, A. (2021). Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kesehatan di Indonesia. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 43–54. <https://doi.org/10.22146/jsds.2272>
- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278. <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/empower>
- Ndhlovu, E., Dube, K., & Kifworo, C. M. (2024). Tourism and Hospitality Trends and Sustainable Development: Emerging Issues in the Digital Era. In E. Ndhlovu, K. Dube, & C. M. Kifworo (Eds.), *Tourism and Hospitality for Sustainable Development* (pp. 1–21). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63073-6_1
- Pramesti, I. Y., Yani, A. R., & Aji, R. I. (2024). Perancangan Visual Media Promosi Romokalisari Adventure Land Bagi Segmen Keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1197–1210. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10304>
- Pramudyana, A., & Prabowo, B. (2024). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Berkunjung Kembali Ke Romokalisari Adventure Land Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2478–2491. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1368>
- Rahmawati, A., Peachilia, I. P. P., Hanifah, D. S., & Humaedi, S. (2024). Potensi Implementasi Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wisata Cigadung. *Pekerjaan Sosial*, 23(1), 119–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v23i1.1109>
- Tamrin, M. H., Fatimah, S. S. N., & Wahyuni, S. (2022). Community Participation in The Successful Community Empowerment Program (Prodamas) In Ngronggo Village Kediri City. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1681>
- Wani, M. J. G., Loganathan, N., & Mujalli, A. (2024). The impact of sustainable development goals (SDGs) on tourism growth. Empirical evidence from G-7 countries. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2397535. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2397535>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Afifah Dina Fatin, M. Husni Tamrin, Deasy Arieffiani, Agus Wahyudi. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.